



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **GANJAR PRANOWO**
2. Jabatan : **GUBERNUR**
3. NHK : **35301**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 2.585.531.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 128 m2/99 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 660.827.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/21 m2 di PURBALINGGA, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 128 m2/99 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 610.704.000
4. Tanah Seluas 278 m2 di PURBALINGGA, HASIL SENDIRI Rp. 144.000.000
5. Tanah Seluas 1178 m2 di PURBALINGGA, WARISAN Rp. 65.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 658 m2/56 m2 di PURBALINGGA, WARISAN Rp. 60.000.000
7. Bangunan Seluas 34 m2 di SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
8. Bangunan Seluas 34 m2 di SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 1.042.000.000

1. MOBIL, NISSAN TEANA MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
2. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000



3. MOTOR, VIAR SCOOTER Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
12.000.000
4. MOTOR, KAWASAKI ER-6N Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.
70.000.000
5. MOBIL, TOYOTA CROWN Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp.
200.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	732.861.750
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	6.164.848.313
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	10.525.241.063
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	10.525.241.063

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.